

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUJUK ORANG UNTUK
MEMILIH SUARANYA LEBIH DARI SATU KALI SECARA
BERSAMA-SAMA PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH
(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. Jap)**

Agus Ranida *

Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum **

Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H***

ABSTRAK

Pemilihan umum sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksanaan demokrasi. Praktinya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat terjadi tindak pidana seperti menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya lebih dari satu kali secara bersama-sama dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah, bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya lebih dari satu kali secara bersama-sama dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. Jap, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. Jap

.Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu dengan menganalisis putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. Jap dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum tindak pidana Pemilu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. Tentang Pemilihan Umum dan pengaturan tentang pemilihan Kepala Daerah Diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya lebih dari satu kali secara bersama-sama dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. Jap dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pertimbangan hukum hakim Selama persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar sehingga para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemilihan, Kepala Daerah.

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF INDUCEMENT OF
PEOPLE TO VOTE MORE THAN ONCE TOGETHER IN
THE ELECTION OF REGIONAL HEAD
(Study of Decision Number 6/Pid.Sus/2021/PN. Jap)**

Agus Ranida *

Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum **

Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H***

ABSTRACT

General elections as a means to channel people's aspirations are the most real manifestation of the implementation of democracy. In practice, in the implementation of regional head elections, criminal acts can occur such as ordering people who are not entitled to vote to cast their votes more than once together in the Regional Head Election.

The problem in this thesis is how to regulate the law on criminal acts of regional head elections, how is the responsibility of perpetrators of criminal acts of people who are not entitled to vote to cast their votes more than once together in decision Number 6 / Pid.Sus / 2021 / PN. Jap, how are the judge's legal considerations in decision Number 6 / Pid.Sus / 2021 / PN. Jap . The research conducted is normative research, namely by analyzing decision Number 6 / Pid.Sus / 2021 / PN. Jap and related to applicable laws and regulations. The data analysis used is qualitative data.

Based on the results of the study, it is known that the legal provisions for criminal acts of the Election are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017. Concerning General Elections and regulations regarding the election of Regional Heads Regulated in Law Number 6 of 2020 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2020 on the Election of Governors, Regents, and Mayors into Law. The liability of perpetrators of criminal acts of people who are not entitled to vote to vote more than once together in decision Number 6/Pid.Sus/2021/PN. Jap was sentenced to imprisonment for 3 (three) months each and a fine of Rp. 3,000,000.00 (three million rupiah) each. Judge's legal considerations During the trial, the panel of judges did not find any reasons for eliminating the criminal offense, either forgiving or justifying reasons so that the defendants can be held accountable for their actions.

Keywords: Criminal Acts, Elections, Regional Heads..

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

***Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*